

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI BOBONG KELAS II



TRIWULAN I
TAHUN 2026

PENGESAHAN

Pada hari ini Selasa, Tanggal 06 April 2026, Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Bobong, Triwulan I Tahun 2026, diajukan oleh Tim Kerja Laporan dimaksud untuk disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bobong.

Disahkan di : Bobong
Pada Tanggal : 06 April 2026
Ketua Pengadilan Negeri Bobong,

Dr. Syamsuni, S.H., M.Kn

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sejak tahun 2009 terus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku *Road Map*. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi; birokrasi yang efektif dan efisien; dan birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Birokrasi sebagai pelaksana tugas pemerintah terus melakukan perubahan dalam mencapai sasaran Reformasi Birokrasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Agar masyarakat merasakan hasil percepatan Reformasi Birokrasi yang telah dilakukan pemerintah, terutama pada unit kerja, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani menitik-beratkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai di antaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan Negeri Bobong ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan e-survey Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
- h) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (siSUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survey persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, e-survey dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- b. Penyiapan Bahan

- Kuesioner elektronik (e-survey).
 - Bagian dari Kuesioner/Pengantar.
 - Kelengkapan peralatan.
- c. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
- Jumlah Responden.
 - Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- d. Penyusunan Jadwal
- Penyusunan rencana dan pelaksanaan survey dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- a. Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam kuesioner elektronik (e-survey).
- b. Pengisian Kuesioner elektronik (e-survey) oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya akan tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survey.
- c. Pengujian kualitas dan validitas data.
- d. Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner elektronik (e-survey) kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survey

Survey dilaksanakan dalam interval waktu triwulan atau per 3 (tiga) bulan (dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Untuk melakukan survey secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket), dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala *Likert* adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala *Likert* responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survey dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Bobong.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Bobong.

2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner elektronik (e-survey) yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan melalui

pengisian e-survey dan data yang terisi sebanyak 40 responden. Selanjutnya data tersebut tersimpan secara otomatis pada aplikasi e-survey.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Ketua Pengadilan Negeri Bobong Kelas II). Selaku Ketua Tim Survey dimana Ketua Pengadilan Negeri Bobong akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, yang melakukan pengisian e-survey dan responden benar-benar melakukan pengisian e-survey sesuai apa yang di alami di Pengadilan Negeri Bobong.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama : Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

Kedua : Mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 - 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 1 - 400.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survey persepsi anti korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini;

Gambar 1
Model alur penyusunan survey IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1
Unsur Ruang lingkup survey Indeks Persepsi Korupsi

NO	UNSUR RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Pencaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2
Nilai Persepsi Korupsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konvensi	Nilai Interval	Mutu	Kinerja
1	81.26 – 100,00	3,26 - 4,00	4	Bersih dari Korupsi

2	62,51 – 81,25	2,51 – 3, 25	3	Cukup Bersih dari Korupsi
3	43,76 – 62,50	1,76 – 2,50	2	Kurang Bersih dari Korupsi
4	25,00 – 43,75	1,00 – 1,75	1	Tidak Bersih dari Korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survey yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong mayoritas memiliki latar belakang lulusan SMU yakni sebanyak 57 %, untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

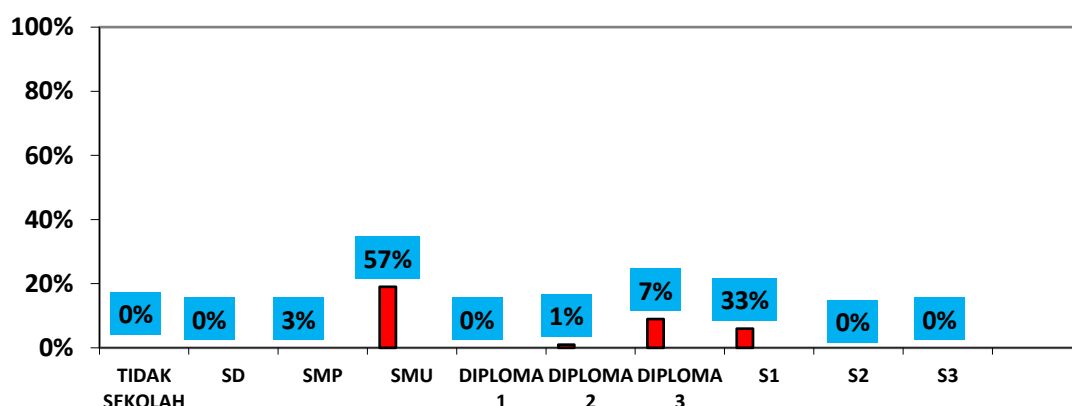
Tabel 3
Tingkat pendidikan responden

NO	PENDIDIKAN TERAKHIR	FREKUENSI	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	19	57%
5	Diploma 1	0	0%
6	Diploma 2	1	3%
7	Diploma 3	9	26%
8	S1	6	17%
9	S2	0	0%
10	S3	0	0%
JUMLAH		35	100%

Sumber: Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pendidikan terakhir di atas, secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 2
Tingkat Pendidikan Responden



3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 66% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong memiliki pekerjaan Swasta dan 23% pekerjaan sebagai Wirausaha, 9% pekerjaan sebagai PNS, 3% pekerjaan sebagai Tenaga Kontrak, 0% pekerjaan sebagai POLRI, 0% pekerjaan sebagai Lainnya dan 0% pekerjaan sebagai TNI, untuk lebih jelasnya data ditampilkan pada tabel berikut:

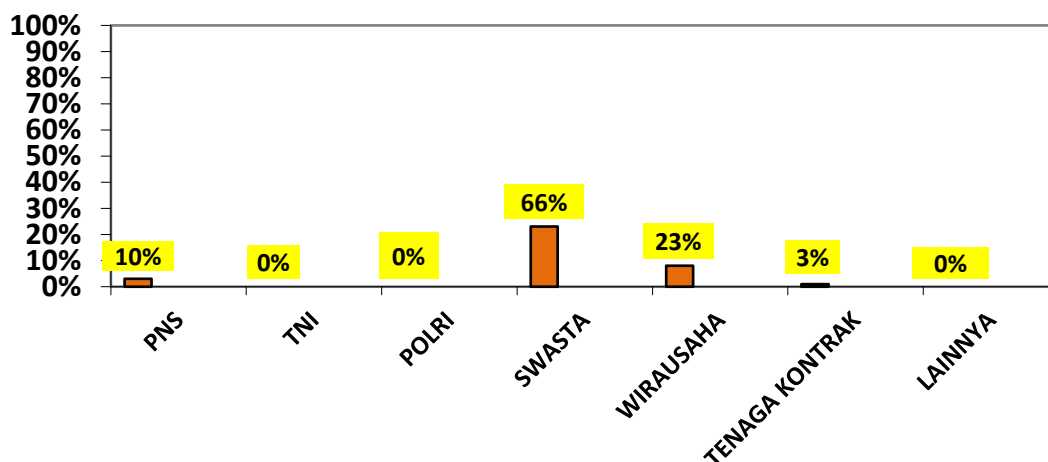
Tabel 4
Jenis Pekerjaan Responden

NO	PEKERJAAN	FREKUENSI	%
1	PNS	3	9%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	0	0%
4	SWASTA	23	66%
5	WIRUSAHA	8	23%
6	TENAGA KONTRAK	1	3%
7	LAINNYA	0	0%
JUMLAH		35	100%

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survei IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Februari 2026

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Pekerjaan diatas, secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 3
Jenis Pekerjaan Responden



Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survei IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.1.3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa pengguna layanan berada dalam kelompok usia 18-28 tahun sebesar 48,57 %, pada usia 29-39 tahun sebesar 34,28 %%, usia 40-49 tahun sebesar 17,14 %, usia 50-59 tahun sebesar 0,00%, Jumlah Responden semakin mengecil bagi kelompok usia 60-69 tahun sebesar 0,00% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

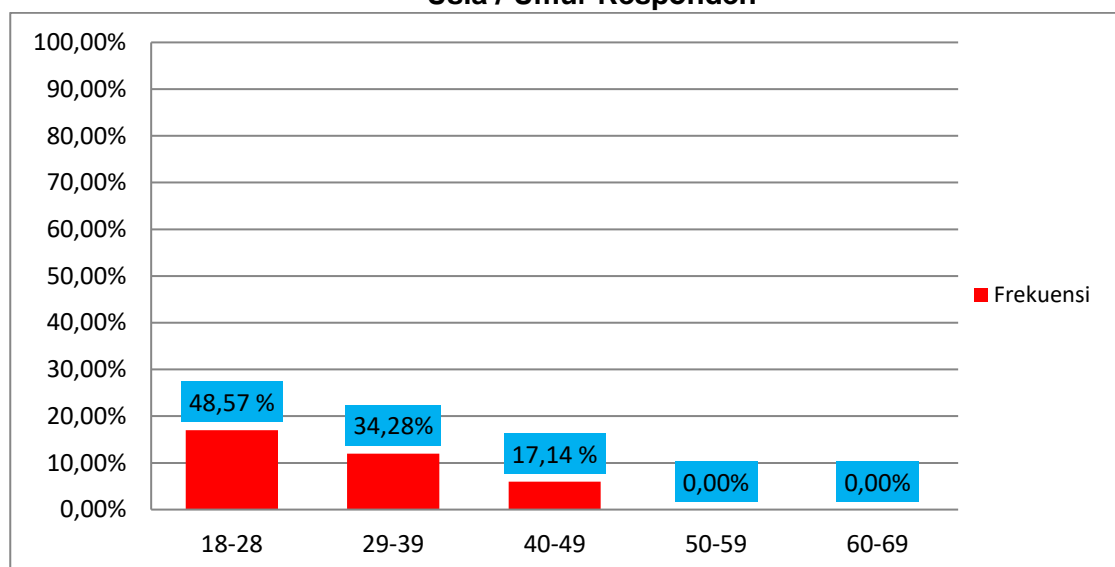
Tabel 5
Usia / Umur Responden

No	Umur/thn	Jumlah (orang)	% (Persentase)
1	18-28 tahun	17	48,57 %
2	29-39 tahun	12	34,28 %
3	40-49 tahun	6	17,14 %
4	50-59 tahun	0	0,00 %
5	60-69	0	0,00 %
	Total	35	100 %

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Usia/Umur Responden di atas, secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 4
Usia / Umur Responden



Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.1.3. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas berdasarkan jenis kelamin, menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki yang paling banyak sebagai pengguna layanan sebesar 74% dan berjenis kelamin perempuan sebesar 26% sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

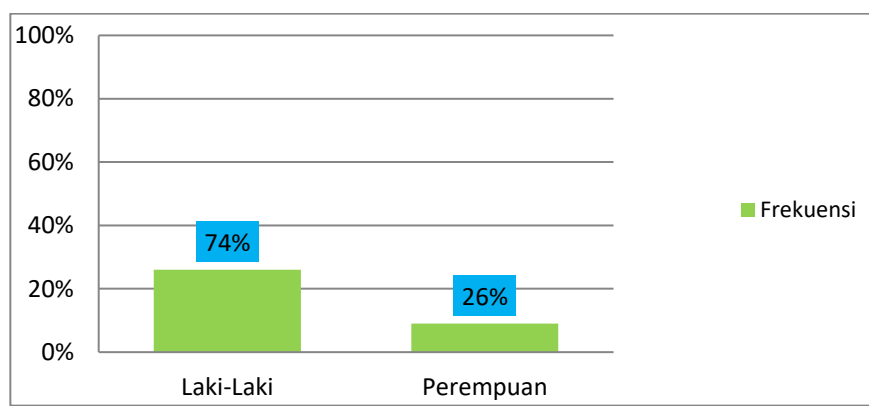
Tabel 6
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

NO	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-Laki	26	74%
2	Perempuan	9	26%
JUMLAH		35	100%

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Kelamin Responden di atas, secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 4
Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.1.4. Layanan yang Digunakan

Layanan yang digunakan oleh responden adalah layanan pidana, layanan perdata, layanan hukum/informasi, dan layanan administrasi umum sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

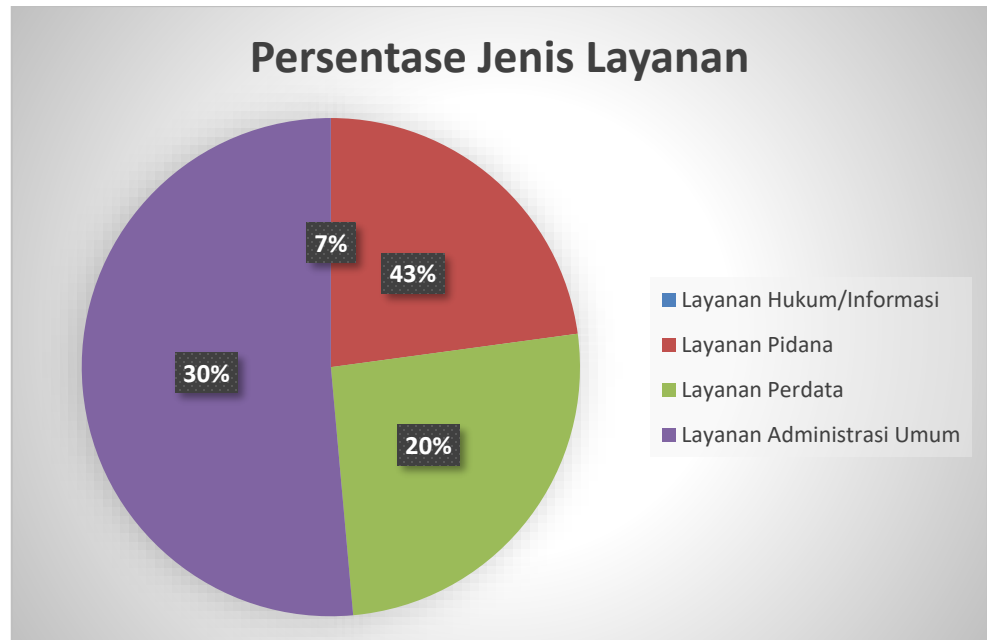
Tabel 6
Jenis layanan yang dipergunakan responden

No	Jenis Layanan	Frekuensi	%
1	Layanan Pidana	8	23%
2	Layanan Perdata	9	26%
3	Layanan Hukum/Informasi	0	0%
4	Layanan Administrasi Umum	18	51%
Jumlah		35	100%

Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Jenis Pelayanan Responden di atas, secara visual disajikan data dalam bentuk diagram sebagai berikut:

Gambar 5
Jenis layanan yang dipergunakan responden



Sumber : Hasil pengolahan data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari sampai dengan Maret 2026

3.2. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index baik **4,00** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Manipulasi Peraturan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup manipulasi peraturan dengan pertanyaan "**Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

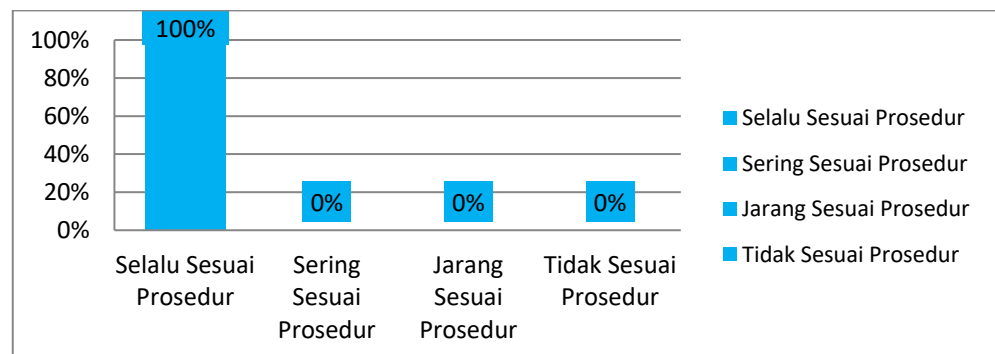
Tabel 7
Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu Sesuai Prosedur	4	35	100%
2	Sering Sesuai Prosedur	3	0	0%
3	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0%
4	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Grafis Indikator Manipulasi Peraturan



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Penyalahgunaan Jabatan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Penyalahgunaan Jabatan dengan pertanyaan "**Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

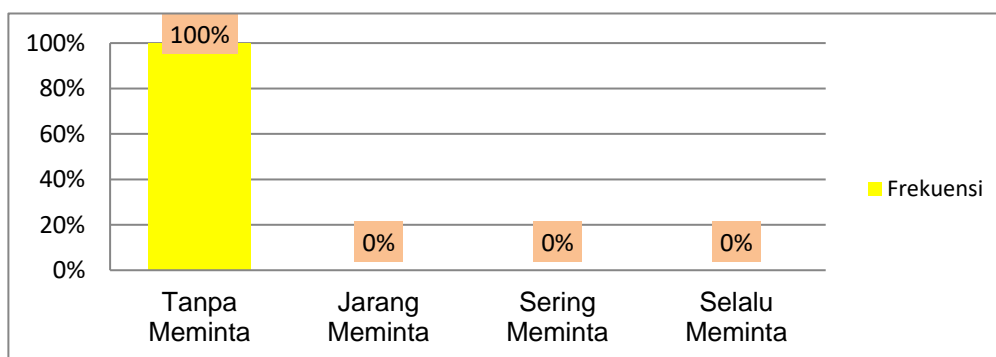
Tabel 8
Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	35	100%
2	Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	0	0%
3	Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0%
4	Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 7
Grafis Indikator Penyalahgunaan Jabatan



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II **bersih** dari Indikasi **Menjual Pengaruh**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Menjual Pengaruh dengan pertanyaan "**Pernahkan dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

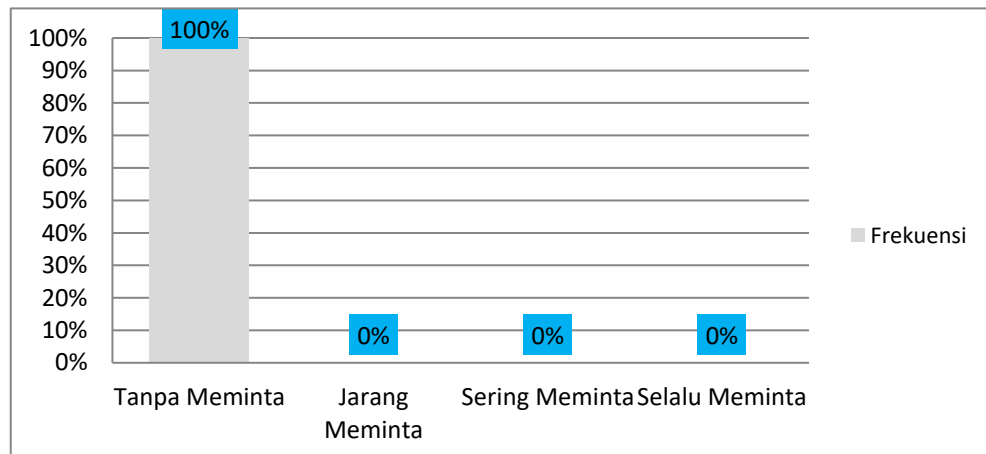
Tabel 9
Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	35	100%
2	Jarang/Pernah	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 8
Grafis Indikator Menjual Pengaruh



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,00** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong Kelas II **bersih** dari Indikasi **Transparansi Biaya**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Transparansi biaya dengan pertanyaan "**Apakah selalu dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di pengadilan?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

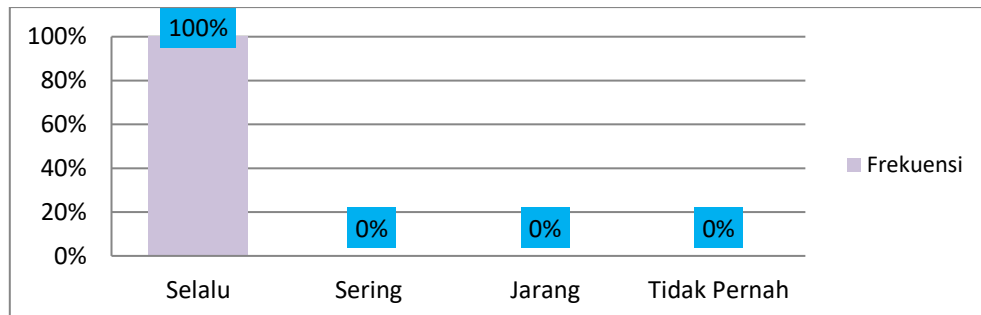
Tabel 10
Indeks pada Indikator Transaksi Biaya

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	35	100%
2	Sering	3	0	0%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak Pernah	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Grafis Indikator Transaksi Biaya



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,00** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Biaya Tambahan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Biaya Tambahan dengan pertanyaan "**Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

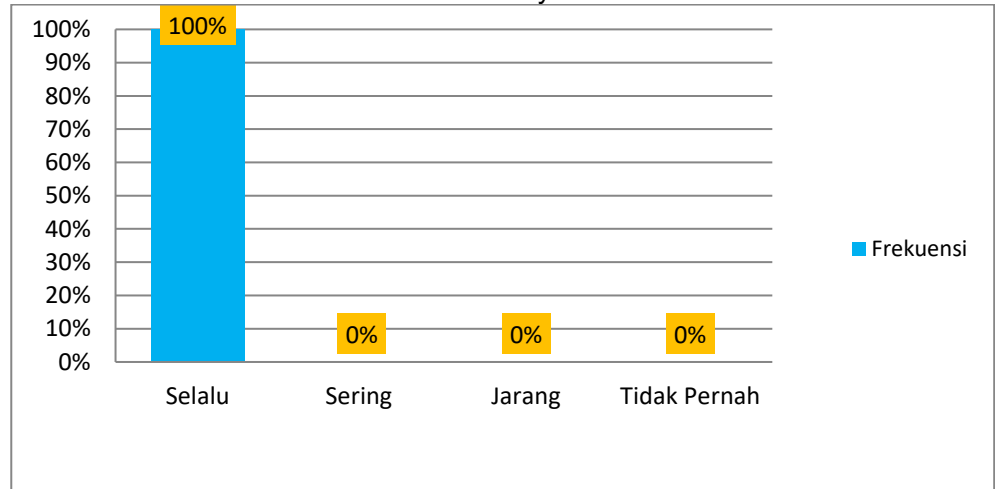
Tabel 11
Indeks pada Indikator Biaya Tambahan

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	35	100%
2	Sering	3	0	0%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak Pernah	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 9
Grafis Indikator Biaya Tambahan



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Hadiah**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Hadiah dengan pertanyaan **“Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

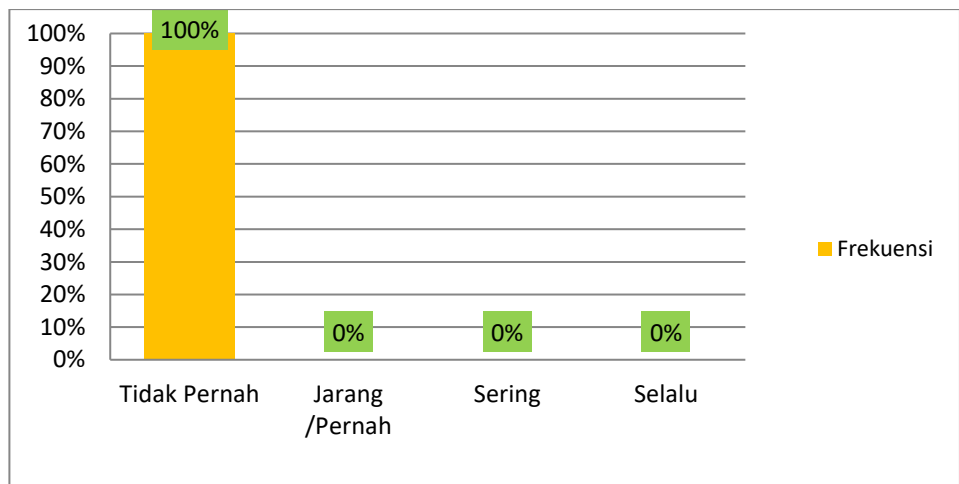
Tabel 12
Indeks pada Indikator Hadiah

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	35	100%
2	Sering	3	0	0%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak Pernah	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 12
Grafis Indikator Hadiah



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.7. Indikator Transparansi Pembayaran

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Transparansi Pembayaran**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Transparansi Pembayaran dengan pertanyaan "**Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

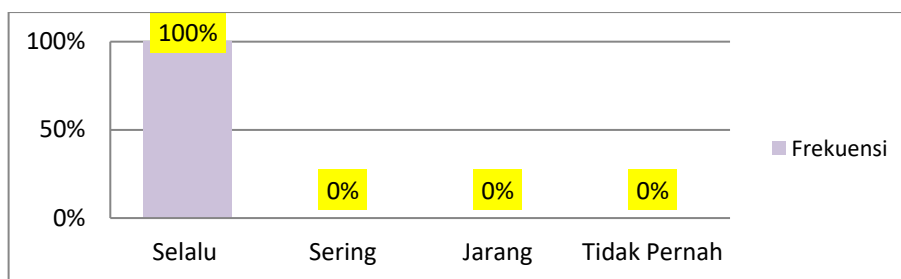
Tabel 13
Indeks pada Indikator Transparansi Pembayaran

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Selalu	4	35	100%
2	Sering	3	0	0%
3	Jarang	2	0	0%
4	Tidak Pernah	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 13
Grafis Indikator Transparansi Pembayaran



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pencaloan ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Pencaloan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Pencaloan dengan pertanyaan **“Apakah pernah mengetahui ada praktek pencaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

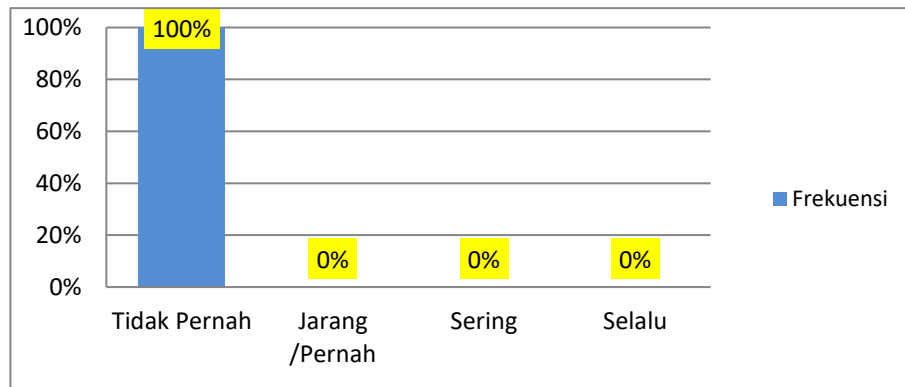
Tabel 14
Indeks pada Indikator Percaloan

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	35	100%
2	Jarang/Pernah	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 14
Grafis Indikator Percaloan



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index sangat baik **4,000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong **bersih** dari Indikasi **Perbuatan Curang**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Perbuatan Curang dengan pertanyaan **“Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

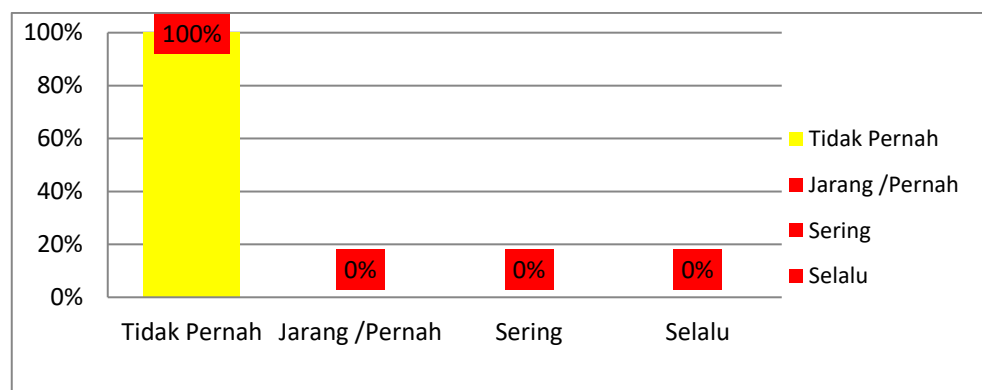
Tabel 15
Indeks pada Indikator Perbuatan Curang

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	35	100%
2	Jarang/Pernah	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 15
Grafis Indikator Perbuatan Curang



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index memuaskan **4.000** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori "**Bersih dari Korupsi**".

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong bersih dari Indikasi **Transaksi Rahasia**.

Adapun hasil jawaban kuesioner elektronik (e-survey) persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, unsur ruang lingkup Transaksi Rahasia dengan pertanyaan "**Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staf Pengadilan diluar persidangan?**" dapat disajikan pada tabel berikut ini:

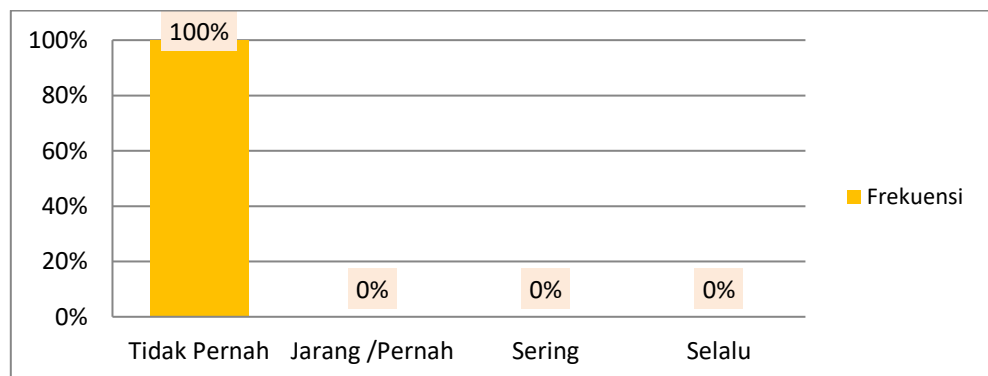
Tabel 16
Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia

NO	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1	Tidak Pernah	4	35	100%
2	Jarang/Pernah	3	0	0%
3	Sering	2	0	0%
4	Selalu	1	0	0%
Jumlah			35	100%

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:

Gambar 16
Grafis Indikator Transaksi Rahasia



Sumber: Hasil Pengolahan Data kuesioner e-survey IPK Triwulan I periode Januari 2026 sampai dengan Maret 2026

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong

Target nilai capaian sebagaimana yang ditetapkan oleh Badilum yakni 3.6. Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bobong sebesar 4,00.

Tabel 17

Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja
pada Pengadilan Negeri Bobong

NO	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	KET
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Jumlah	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	
NRR Per RL	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	40,000
NRR Tertimbang	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	0,400	4,000

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di atas, maka skor **4,00** indeks tersebut, masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 – 4,00.

Berdasarkan hasil survei ini, semua Pelayanan pada Pengadilan Negeri Bobong masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**, namun dari 10 unsur terdapat 3 unsur ruang lingkup yang memiliki nilai terendah, untuk itu perlu adanya evaluasi dan tindak lanjut, serta pembinaan kepada petugas PTSP untuk meningkatkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Bobong.

Terlepas dari hasil pencapaian tersebut namun tetap adanya perbaikan dan tindak lanjut pada semua unsur ruang lingkup dengan prioritas 3 (tiga) Unsur Ruang Lingkup yang memiliki nilai terendah berdasarkan hasil perhitungan pada aplikasi siSUPER yaitu:

1. Unsur Ruang lingkup U1 (Manipulasi Peraturan) dengan nilai (4,00);
2. Unsur Ruang lingkup U2 (Penyalagunaan Jabatan) dengan nilai (4,00);
3. Unsur Ruang lingkup U3 (Menjual Pengaruh) dengan nilai (4,00);

1.4. Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Survey Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Layanan Di Pengadilan Negeri Bobong

Adapun karena seluruh ruang lingkup mendapatkan nilai penuh, maka tindak lanjut dilakukan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

N O	PRIORITAS UNSUR	PROGRAM/ KEGIATAN	WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Manipulasi Peraturan (U1)	Melakukan pembinaan perubahan pola pikir kepada petugas PTSP untuk bisa melayani dengan baik dan menjalankan tugas sesuai aturan	Januari 2026	Panitera, Sekretaris, para Panmud dan para Kasub
2.	Penyalagunaan Jabatan (U2)	Karena sebenarnya nilai telah sempurna, maka dilakukan pembinaan dan evaluasi untuk mempertahankan nilai unsur ini.	Februari 2026	Panitera, Sekretaris, para Panmud dan para Kasub
3.	Menjual Pengaruh (U3)	Melakukan pembinaan dan evaluasi kepada petugas PTSP agar tidak melakukan tindakan memanfaatkan pengaruh kita sebagai petugas untuk pelayanan	Maret 2026	Panitera, Sekretaris, para Panmud dan para Kasub

3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja Pada Pengadilan Negeri Bobong

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survey yang dilakukan ini juga menjangkau kesan dan pesan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada

Pengadilan Negeri Bobong. Adapun kesan dan pesan dari responden adalah sebagai berikut:

Tabel 19
Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Bobong

No	Kesan & Pesan Responden
1	Petugas melayani dengan sopan dan tidak pernah meminta biaya tambahan dalam bentuk apapun
2	Petugas melayani dengan cepat tanpa meminta imbalan atau janji
3	petugas pelayanan tidak pernah meminta imbalan kepada pengguna layanan
4	Petugas melayani sesuai prosedur dan tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun
5	sukses selalu pengadilan negeri Bobong
6	sukses selalau pengadilan negeri Bobong
7	Semoga dapat dipertahankan yang sudah baik.
8	petugas melayani tanpa meminta imbalan dalam bentuk apapun
9	petugas pelayanan melayani dengan cepat dan tidak pernah meminta biaya layanan dalam bentuk apapun
10	Petugas melayani dengan cepat dan tidak pernah meminta biaya pengguna layanan dalam bentuk apapun
11	Petugas melayani dengan cepat dan sesuai serta petugas tidak pernah meminta biaya tambahan dalam bentuk apapun
12	Pelayanan di pengadilan melayan sesuai dengan prosedur dan petugas melayani tanpa meminta imbalan apapun
13	petugas pelayanan tidak pernah meminta biaya layanan dalam bentuk apapun
14	petugas melayani dengan cepat dan tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun
15	Petugas pelayanan tidak pernah meminta biaya layanan yang diberikan oleh petugas tersebut
16	petugas tidak pernah meminta biaya layanan dalam bentuk apapun
17	pembuatan surat izin besuk tahanan gratis dan petugas tidak pernah meminta imbalan dalam bentuk apapun
18	petugas tidak pernah meminta biaya pelayanan
19	Petugas melayani tanpa meminta biaya tambahan dalam bentuk apapun
20	petugas melayani dengan cepat dan tidak pernah menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun
21	petugas tidak pernah meminta biaya tambahan dalam bentuk apapun
22	petugas pelayanan tidak pernah meminta biaya tambahan apapun
23	petugas melayani dengan cepat dan tidak pernah meminta biaya tambahan
24	petugas tidak pernah memintabiaya layanan apapun
25	petugas melayani tanpa meminta imbalan apapun
26	petugas tidak pernah meminta biaya tambahan atas layanan yang diberikan
27	petugas tidak pernah meminta biaya layanan dalam bentuk apapun
28	petugas pelayana tidak pernah meminta biaya tambahan apapun
29	petugas pelayanan tidak pernah meminta biaya tambahan berupa apapun
30	petugas pelayanan melayani sesuai dengan prosedur dan tidak pernah meminta biaya pelayanan
31	petugas tidak pernah meminta biaya pelayanan dan petugas melayanai dengan sopan
32	petugas melayani dengan cepat dan petugas tidak pernah meminta biaya pelayanan
33	pelayanan di pengadilan sesuai prosedur dan petugas melayani tanpa meminta imbalan apapun
34	petugas melayani dengan baik dan tidak pernah meminta biaya pelayanan apapun

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Dari hasil survey Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bobong Triwulan I Periode bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Bobong memiliki Indeks Persepsi Korupsi **4,00** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1	Manipulasi Peraturan	4,000
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000
3	Menjual Pengaruh	4,000
4	Transaksi Biaya	4,000
5	Biaya Tambahan	4,000
6	Hadiah	4,000
7	Transparansi Biaya	4,000
8	Pencaloan	4,000
9	Perbuatan Curang	4,000
10	Transaksi Rahasia	4,000

2. Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bobong Triwulan I Periode bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki indeks 4,00 atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi**.
3. Berdasarkan hasil survei IPK dari 10 indikator terhadap 35 responden, diperoleh nilai sebesar **4,00** dan kategori/ruang lingkup dengan indeks tertinggi meliputi seluruh ruang lingkup 10 (sepuluh) indikator yang rata-rata memperoleh nilai sebesar 4,000.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan pada hasil survey IPK Triwulan I Periode bulan Januari 2026 sampai dengan Maret 2026 maka diperoleh beberapa kesan dan pesan dari responden yang kesemuanya positif dan bermanfaat untuk mempertahankan pelayanan kepada pencari keadilan.

RUJUKAN:

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas 2023.

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Di Bawahnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Preview Publikasi Indeks

Print Tutup



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI BOBONG

Jl. M. Taher Mus, Desa Bobong, Kec. Taliabu Barat, Kab. Pulau Taliabu, Maluku Utara KAB. PULAU TALIABU
MALUKU UTARA
<http://pn-bobong.go.id/>



PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

Periode 1 Januari 2026 sampai 31 Maret 2026

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

4,00 / 100,00%

Jumlah	35 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 26	
	PEREMPUAN : 9	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	Diploma 2 : 1	Diploma 3 : 9
	SD : 0	S1 : 6
	SMP : 0	S2 : 0
	SMU : 19	S3 : 0
	Diploma 1 : 0	
Pekerjaan	PNS : 3	SWASTA : 23
	TNI : 0	WIRUSAHA : 8
	POLRI : 0	TENAGA KONTRAK : 1
	LAINNYA : 0	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

- | | |
|---|-------|
| 1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? | 4,000 |
| 2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ? | 4,000 |
| 3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? | 4,000 |